



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

TOL LAUT SEBAGAI ANDALAN WARGA KAWASAN TIMUR INDONESIA

Sony Hendra Permana

Analisis Legislatif Ahli Muda

sony.hendra@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Hadirnya program tol laut telah memberikan harapan yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia. Melalui tol laut diharapkan dapat menurunkan disparitas harga akibat mahalnya ongkos logistik sehingga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat dapat tersebar secara merata di Kawasan Timur Indonesia. Program tol laut menjawab kesulitan transportasi pulau terluar Indonesia yang telah dialami puluhan tahun lamanya, salah satunya bagi masyarakat Reni, distrik Kepulauan Ayau, Kabupaten Raja Ampat. Masyarakat kampung Reni seluruhnya adalah nelayan sehingga mereka menggunakan perahu mesin atau *longboat* pribadi untuk menjangkau ibukota atau kabupaten guna membeli kebutuhan hidup maupun menjual hasil perikanan namun dengan biaya transportasi yang cukup mahal. Hadirnya program tol laut akan dapat menekan biaya transportasi menjadi lebih murah, sehingga bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat dapat lebih terjangkau. Selain itu, di beberapa pulau yang disinggahi oleh kapal tol laut, warganya tidak hanya memanfaatkan untuk pengiriman kebutuhan pokok dari Pulau Jawa tetapi juga untuk mengirimkan komoditas lokal seperti kopra, jambu mete, rumput laut, ikan, dan lain-lain sehingga masyarakat mendapatkan harga jual yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan menjualnya ke pengepul lokal.

Program tol laut mulai diluncurkan pertama kali tanggal 4 November 2015 untuk melayani 3 trayek pelayaran dengan menggunakan 3 kapal. Jumlah kapal dan trayek program tol laut terus bertambah setiap tahunnya. Berikut perkembangan program tol laut sejak tahun 2015 sampai dengan 2021 (lihat tabel 1).

Tabel 1. Perkembangan Program Tol Laut

Tahun	Trayek	Jumlah Kapal	Muatan (ton)
2015	3 rute	3 unit	NA
2016	6 rute	6 unit	81,404
2017	13 rute	13 unit	233,139
2018	18 rute	19 unit	239,875
2019	20 rute	19 unit	245,370
2020	26 rute	26 unit	362,560
2021	32 rute	32 unit	477,600

Untuk tahun 2022 ini, jumlah trayek tol laut kembali bertambah menjadi 34 trayek yang tertuang pada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP - DJPL 8 Tahun 2022. Sampai dengan Agustus muatan yang telah dilayani sebesar 75.860 ton.

Meskipun perkembangan program tol laut telah cukup baik dalam beberapa tahun terakhir, namun masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam program ini, di antaranya: *pertama*, lamanya waktu pelayaran yang cukup panjang dalam mengirimkan barang yang berpotensi mengakibatkan penurunan kualitas dari barang tersebut. *Kedua*, masih terdapat beberapa daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang belum dijangkau.

Ketiga, situasi dan kondisi global yang tak menentu akibat perang di Rusia-Ukraina yang dikhawatirkan dapat mengganggu pelayanan logistik yang disebabkan banyak kapal tidak berlayar karena biaya operasional meningkat. *Keempat*, masih adanya muatan kosong dari kapal yang berlayar kembali dari Kawasan Timur Indonesia. Selain itu, terdapat beberapa permasalahan program tol laut salah satunya adalah adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengindikasikan terjadi penyimpangan kelebihan pembayaran subsidi kepada operator. Hasil Pemeriksaan BPK Semester II 2020 juga mendapati temuan perencanaan trayek tol laut belum dilaksanakan secara memadai, seperti tidak memerhatikan fasilitas sarana dan prasarana pelabuhan sehingga trayek tol laut berpotensi tidak dijalankan sesuai rute yang ditetapkan. Ditambah lagi ditemukan realisasi waktu tempuh kapal-kapal tol laut belum sepenuhnya sesuai dengan target waktu tempuh dalam surat keputusan trayek dan kontrak. Berbagai tantangan dan permasalahan tersebut perlu terus dicarikan jalan keluarnya oleh pemerintah agar program ini benar-benar dapat dinikmati seluruh masyarakat khususnya di Kawasan Timur Indonesia.

Atensi DPR

Program tol laut telah menjadi perhatian DPR RI, khususnya dalam hal perencanaan dan penggunaan anggaran, jangkauan rute, sampai penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pendukung. Komisi V DPR RI perlu melakukan pengawasan secara menyeluruh mulai dari perencanaan program sampai implementasinya mengingat pembiayaan subsidi berasal dari APBN. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan dalam perhitungan dan pembayaran subsidi tol laut agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pemerintah dapat berkonsultasi dengan Komisi V DPR RI dalam menentukan daerah yang menjadi prioritas dilayani tol laut. Komisi V DPR RI perlu mengamati keterlibatan pihak operator yang mengoperasikan kapal-kapal program tol laut agar menjalankan tugasnya secara tepat sasaran untuk melayani masyarakat dalam rangka penyediaan logistik yang murah dan handal. Pemerintah bersama-sama dengan Komisi V DPR RI dapat merumuskan formula yang tepat untuk merumuskan alternatif transportasi yang lebih murah untuk mendukung program tol laut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat dengan menurunkan disparitas harga dan biaya logistik nasional.

Sumber

antaranews.com., 15 Agustus 2022;
dpr.go.id, 6 Juli 2022;
Kompas, 16 Agustus 2022;
Media Indonesia, 15 Agustus 2022;
okezone.com, 6 Januari 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Venti Eka Satya
Monika Suhayati
Rafika Sari

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.